

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 0



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## DKI Bersiap Lelang Ulang Sistem Jalan Berbayar

PTUN meminta tidak ada lelang ulang sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

### Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

**JAKARTA** — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta perihal *electronic road pricing* (ERP). Meski demikian, Dinas Perhubungan DKI memastikan rencana penerapan sistem jalan berbayar ini akan tetap dilanjutkan. Bahkan pemerintah tengah mengkaji rencana untuk menggelar ulang lelang proyek ERP. "April bisa proses (lelang)," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, kemarin.

Pada Selasa lalu, PTUN Jakarta mengabulkan seluruh gugatan konsorsium SmartERP yang diwakili PT Bali Towerindo Sentra Tbk. Dalam gugatan itu, PT Bali Towerindo meminta surat pembatalan lelang yang diterbitkan Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik—instansi di bawah Dinas Perhubungan—dicabut.

Dalam persidangan, hakim memutuskan menganulir surat pembatalan lelang yang terbit pada 2 Agustus 2019 itu. Hakim juga memerintahkan pemerintah DKI Jakarta tidak menggelar lelang ulang hingga ada putusan berkekuatan hukum tetap.

Syafrin mengklaim keputusan Dinas Perhubungan untuk membatalkan lelang ERP pada tahun lalu itu sudah tepat. Sebab, dalam lelang saat itu ditemukan pelanggaran berupa *post bidding*, yakni tindakan mengubah, menambah,

atau mengurangi dokumen pengadaan atau penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran. "Jadi, jika ini (lelang saat itu) diteruskan, tentu ada konsekuensi hukum pidana di dalamnya," ujarnya. Apalagi keputusan pembatalan lelang itu telah sesuai dengan saran dari Kejaksaan Agung.

Lelang proyek ERP 2019 diikuti tiga perusahaan, yaitu Q-Free, Kapsch TrafficCom, dan PT Bali Towerindo Sentra Tbk. Q-Free dan Kapsch TrafficCom pernah menggelar uji coba ERP pada 2014. Q-Free, perusahaan asal Norwegia, mengetes sistem ERP di Jalan HR. Rasuna Said. Sedangkan Kapsch, perusahaan asal Swedia, menguji coba sistem itu di Jalan Jenderal Sudirman.

Belakangan, justru Q-Free dan Kapsch TrafficCom memilih mundur dari proses lelang. Alasannya, mereka menilai jadwal lelang ERP tidak memiliki kepastian. Dengan mundurnya dua perusahaan itu, otomatis tinggal menyisakan PT Bali Towerindo.

Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhannah mengatakan, dalam perkara ini, Dinas Perhubungan mendapat pendampingan hukum dari Kejaksaan Agung sebagai jaksa pengacara negara.

Adapun Biro Hukum, kata Yayan, hanya membantu jaksa dalam menghadapi gugatan. "Kami membantu untuk menyediakan data," tuturnya.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nirwan Nawawi dan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono belum memberikan penjelasan ihwal putusan pengadilan itu. Pertanyaan *Tempo* tak kunjung dibalas hingga tenggat tulisan ini.

Kuasa hukum PT Bali Towerindo, Gabriel Mukuan, mengungkapkan perusahaan itu mengajukan gugatan terhadap pembatalan lelang ERP karena keputusan Dinas Perhubungan dinilai melanggar prosedur. Atas dasar itulah Bali Towerindo mendaftarkan gugatan ke PTUN pada 25 September 2019.

Apalagi, kata Gabriel, Bali Towerindo telah lolos dalam tahapan lelang bersama dua peserta lain yang belakangan mundur. "Hal itu jadi salah satu alasan kami mengajukan gugatan," ujarnya.

Gabriel mengkritik rencana Dinas Perhubungan yang akan menggelar ulang lelang ERP. Sebab, berdasarkan putusan PTUN, pemerintah seharusnya tidak menggelar lelang ulang sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. ●

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 0



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

# DKI Bersiap Lelang Ulang Sistem Jalan Berbayar

## Jalan Panjang Menuju ERP

**R**ENCANA pemerintah DKI Jakarta untuk menerapkan *electronic road pricing (ERP)* di sejumlah jalan protokol Ibu Kota tersendat-sendat. Padahal proyek sistem jalan berbayar elektronik itu direncanakan sejak 2006, pada era Gubernur Sutiyoso.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta sebenarnya sudah menggelar lelang proyek ini pada tahun lalu. Namun lelang dibatalkan di tengah jalan karena ada indikasi kecurangan. Belakangan, pembatalan itu justru dianulir Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di saat pemerintah DKI akan menggelar lelang ulang.

- November 2012**  
Gubernur Joko Widodo berkoordinasi dengan Menteri Industri Norwegia tentang proyek ERP yang digadang akan dimulai pada 2013. Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama juga membahas proyek yang sama dengan Wakil Kedutaan Swedia pada Maret 2013.
- Juli 2014**  
Pemerintah DKI mulai menguji coba ERP di Jalan Sudirman dan Rasuna Said.
- Juli 2016**  
Gubernur Basuki Tjahaja Purnama menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 149 Tahun 2016 tentang ERP. Tender proyek ini pun dimulai.
- Oktober 2016**  
Komisi Pengawasan Persaingan Usaha menilai proyek ERP melanggar Undang-Undang tentang Persaingan Usaha.
- Maret 2017**  
Basuki merevisi peraturan gubernur dan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2017 tentang ERP.
- Agustus 2019**  
Dinas Perhubungan DKI menerbitkan surat pembatalan lelang pembangunan sistem jalan berbayar elektronik dengan ID lelang 33620127. Pembatalan itu dilakukan sesuai dengan rekomendasi Kejaksaan Agung.
- 25 September 2019**  
Konsorsium Smart ERP diwakili PT Bali Towerindo Sentra, mendaftarkan gugatan atas pembatalan lelang ERP. Gugatan itu tercatat di situs resmi PTUN Jakarta dengan nomor 191/G/2019/PTUN.JKT.
- 3 Maret 2020**  
PTUN mencabut surat pembatalan proses lelang ERP. Majelis hakim mengabulkan seluruh gugatan konsorsium Smart ERP. Majelis hakim juga memerintahkan pemerintah DKI Jakarta tidak menggelar lelang ulang sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap.